

Strategi Keamanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Rivalitas Amerika Serikat - China di Laut China Selatan

Benedictus Benny Koessetianto¹, Bonifasius Agung Nugroho², Kurniawan Firmuzi Syarifuddin³, Susilawati⁴, Taufiq Supriyanto⁵, Wujud Wiyono⁶, Purnomo Yusgiantoro⁷, I Wayan Midhio⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jl.Salemba Raya Nomor 14, Jakarta, Indonesia
bonifasiusnugroho@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze and develop a comprehensive strategy for Indonesia in facing the threats arising from the rivalry between these two superpowers. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, this study systematically assesses and ranks various strategic responses according to predefined criteria. The scenarios considered include the escalation of military conflict, economic conflict, and global political polarization, each further detailed into sub-criteria aspects. Data were collected through primary and secondary sources, including government reports, security analyses, and academic publications, which were then processed to generate pairwise comparison matrices in the AHP. The research findings indicate that Indonesia must prepare itself to face the potential escalation of conflict between the US and China in the South China Sea by prioritizing three national strategic goals: strengthening the country's defense capabilities (military), enhancing diplomacy and ASEAN centrality, and bolstering national economic self-reliance. Through the application of the AHP method, the results suggest that Indonesia's best national strategic priority in addressing the threats of US-China rivalry in the South China Sea is through economic self-reliance. This article offers evidence-based policy guidance and strategic insights for policymakers and academics in navigating the dynamic geopolitical uncertainties, especially those affecting countries in the South China Sea region. The implications of this study enrich the literature on the application of AHP in the context of national security and defense strategy, providing a framework for evaluating policy options in the fast-paced and complex context of global power rivalries

Keywords: Defense Strategy, National Security, Regional Stability, South China Sea, US-China Rivalry.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan strategi komprehensif bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman yang muncul dari rivalitas kedua negara adidaya ini. Menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), studi ini secara sistematis menilai dan meranking berbagai respons strategis menurut kriteria yang telah ditentukan, yakni dengan skenario terjadinya eskalasi konflik militer, eskalasi konflik ekonomi dan eskalasi polarisasi politik global, yang selanjutnya diperinci kembali dalam aspek-aspek sub kriteria. Data dikumpulkan melalui sumber-sumber primer dan sekunder yang meliputi laporan pemerintah, analisis keamanan, dan publikasi akademis, yang kemudian diolah untuk menghasilkan matriks perbandingan berpasangan dalam AHP. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Indonesia harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi eskalasi konflik AS dan China di kawasan Laut China Selatan melalui penentuan 3 (tiga) prioritas strategi Nasional yaitu penguatan kapasitas pertahanan negara (militer), penguatan diplomasi dan sentralitas ASEAN, serta penguatan kemandirian ekonomi Nasional. Melalui penerapan metode AHP, diperoleh hasil dimana prioritas strategi nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman rivalitas AS dan China di Laut China Selatan yang terbaik adalah melalui strategi penguatan kemandirian ekonomi. Artikel ini menawarkan panduan kebijakan yang berbasis bukti dan memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan akademisi dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik yang dinamis, khususnya yang berpengaruh terhadap negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Implikasi dari studi ini yakni memperkaya literatur mengenai aplikasi AHP dalam konteks keamanan nasional dan strategi pertahanan, serta menawarkan kerangka kerja untuk mengevaluasi opsi kebijakan dalam konteks yang serba cepat dan kompleks dari rivalitas besar kekuatan global.

Kata kunci: Keamanan Nasional, Laut China Selatan, Rivalitas AS-China, Stabilitas Regional, Strategi Pertahanan

Copyright (c) 2024 Benedictus Benny Koessetianto, Bonifasius Agung Nugroho, Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, Susilawati, Taufiq Supriyanto, Wujud Wiyono, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio

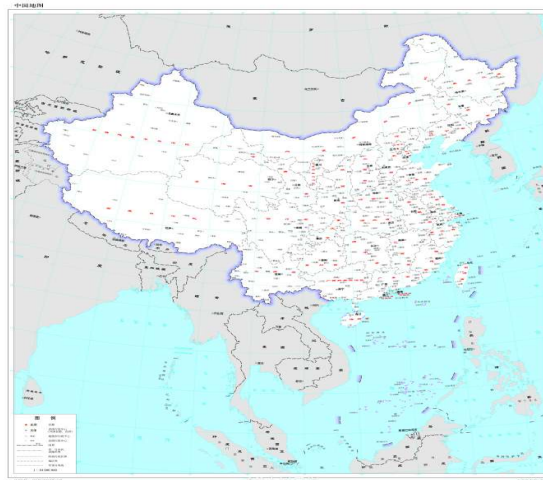
✉ Corresponding author: Benedictus Benny Koessetianto

Email Address: bonifasiusnugroho@gmail.com (Jl.Salemba Raya Nomor 14, Jakarta, Indonesia)

Received 2 January 2024, Accepted 9 January 2024, Published 17 January 2024

PENDAHULUAN

Konflik AS-China di Laut China Selatan merupakan perwujudan dari perjuangan kekuasaan geopolitik yang telah lama ada antara dua ekonomi terbesar dunia. Laut China Selatan sendiri adalah kawasan yang sangat strategis, tidak hanya karena lokasinya yang menjadi jalur pelayaran utama bagi perdagangan global, tetapi juga karena kaya akan sumber daya alam seperti ikan dan potensi minyak serta gas bumi. Selain itu, wilayah ini memiliki nilai strategis militer yang signifikan. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan melalui apa yang dikenal sebagai "Sembilan Garis Putus", sebuah demarkasi yang pertama kali muncul pada peta tahun 1947. Klaim ini termasuk sejumlah pulau, atol, dan fitur karang yang tersebar, yang beberapa di antaranya telah dikembangkan oleh China menjadi pulau buatan yang mampu mendukung infrastruktur militer. Pada tanggal 28 Agustus 2023, sekitar seminggu sebelum pembukaan G20 Summit di India, Kementerian Sumber Daya Alam China menerbitkan standar peta baru (*New Standard Map*) yang banyak disebut pengamat sebagai "Sepuluh Garis Putus", dimana China kembali memasukkan "Sembilan Garis Putus" sebagai bagian dari wilayah China dan menambahkan satu garis putus di sisi timur wilayah Taiwan. Dengan perubahan ini, maka China juga mengklaim sebagian wilayah Taiwan, India dan Filipina.



Gambar 1. *New Standard Map*
Sumber: Kementerian Sumber Daya Alam China (2023)

Klaim China sering kali bertentangan dengan klaim negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. China berargumen berdasarkan sejarah panjang interaksi mereka dengan Laut China Selatan dan dokumen-dokumen historis yang menunjukkan aktivitas eksplorasi dan administrasi di wilayah tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun tidak memiliki klaim teritorial di Laut China Selatan, sangat menentang klaim China yang mereka pandang sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsip kebebasan navigasi dan hukum internasional. AS telah menjalankan operasi "kebebasan navigasi" (*freedom of navigation operations* - FONOPs) untuk menentang klaim maritim yang mereka anggap berlebihan. AS dan sekutu-sekutunya menganggap bahwa klaim China membatasi akses ke jalur-jalur air yang penting dan mengancam keamanan

regional.

Negara-negara di Asia Tenggara dengan klaim tumpang tindih juga telah mengambil langkah-langkah untuk menegaskan kedaulatan mereka, yang terkadang memicu konfrontasi dengan China. Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, keputusan yang ditolak oleh Beijing. Kepentingan internasional, khususnya dari negara-negara yang bergantung pada jalur laut untuk perdagangan, juga meningkatkan tensi. Negara-negara seperti Jepang dan Australia, bersama dengan ASEAN, mencari cara untuk mengatasi masalah ini tanpa meningkatkan ketegangan. Kawasan Laut China Selatan juga memiliki cadangan hidrokarbon yang signifikan, yang membuatnya menjadi area yang menarik bagi eksplorasi dan eksploitasi energi. Negara-negara dengan klaim di wilayah ini, termasuk China, telah berusaha untuk mengembangkan sumber daya ini, kadang-kadang dengan menantang klaim negara-negara lain atau menghadapi tantangan terhadap aktivitas mereka.

Penempatan peralatan militer, seperti misil permukaan-ke-udara dan sistem pertahanan udara oleh China di pulau-pulau yang mereka kuasai, telah meningkatkan kekhawatiran tentang potensi konflik militer. Ini juga memicu balasan dari AS dan sekutunya, termasuk peningkatan kehadiran militer dan latihan bersama di wilayah tersebut. Situasi di Laut China Selatan terus berkembang, dan bagaimana konflik ini dikelola akan memiliki implikasi penting bagi tatanan keamanan dan ekonomi global. Persaingan kekuasaan di kawasan ini bukan hanya masalah bilateral antara AS dan China, tetapi juga masalah multilateral yang melibatkan banyak negara dan kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik di Laut China Selatan, yang telah menjadi sorotan utama dalam studi keamanan internasional, menyoroti kompleksitas geopolitik yang melibatkan AS dan China, serta dampaknya terhadap keamanan nasional negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli telah menyumbang pandangan penting mengenai masalah ini. Robert Kaplan (2014), menekankan bahwa Laut China Selatan bukan hanya sebagai wilayah penting untuk dominasi maritim, tetapi juga kritis untuk jalur perdagangan global dan sumber daya alam. Kaplan menyatakan bahwa pentingnya wilayah ini dalam konteks global tidak bisa diabaikan, terutama mengingat kepadatan rute perdagangan dan sumber daya yang ada di sana. Pada aspek hukum, Beckman (2014) menggarisbawahi kompleksitas klaim teritorial di Laut China Selatan, dengan menekankan pentingnya hukum internasional dan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dalam mengatur klaim tersebut. Pendekatannya menyarankan bahwa penyelesaian sengketa melalui kerangka hukum internasional dapat menjadi salah satu cara untuk menangani ketidakstabilan di kawasan ini. Bill Hayton (2014) dalam analisisnya menyoroti kecenderungan China dalam menegaskan klaimnya yang meningkatkan kekhawatiran akan konflik militer. Hayton juga mengakui pentingnya diplomasi regional dan kerja sama multilateral sebagai alat untuk mengelola ketegangan dan mencegah konflik.

Weissmann (2019) menghadirkan perspektif yang lebih kontemporer dengan menyatakan

bahwa meskipun ada kekhawatiran akan konflik militer yang terbuka sejak tahun 1990-an, Laut China Selatan telah berhasil mempertahankan kondisi perdamaian yang relatif. Menurut Weissmann, hal ini sebagian besar berkat faktor regionalisasi dan interaksi di tingkat elit, termasuk kedekatan ASEAN-China, ASEAN + 3, dan penerimaan China terhadap multilateralisme. Menganalisis dari sudut pandang Teori Keseimbangan Kekuatan (*the Balance of Power Theory*), dinamika di Laut China Selatan mencerminkan kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Teori ini, yang bertujuan mencegah dominasi satu negara atau koalisi negara, berkontribusi pada stabilitas regional dengan meminimalisir kemungkinan konflik terbuka.

Di sisi lain, teori dilema keamanan (*security dilemma*) dalam hubungan internasional menjelaskan tentang muncul dan berkembangnya dinamika perlombaan senjata, pembangunan kekuatan militer dan ketegangan geopolitik. Untuk itu, sangat ditekankan pentingnya komunikasi yang efektif, *confidence-building measures* dan diplomasi dalam mencegah terjadinya eskalasi konflik yang berkembang akibat mispersepsi dan kurangnya kepercayaan antar negara. Graham T. Allison (2015) mengangkat peristiwa dalam 500 tahun terakhir, bahwa terjadi 12 dari 16 situasi dalam sejarah dunia dimana ketika sebuah kekuatan global baru muncul dan mencoba menyaingi dominasi kekuatan lama, maka hal itu menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan peperangan besar di antara kedua kekuatan yang bersaing tersebut. Fenomena ini disebut sebagai *Thucydides Trap*, istilah yang diambil dari ahli sejarah Yunani kuno Thucydides yang menuliskan kisah perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta. Strategi menghadapi ancaman ini, khususnya untuk Indonesia, memerlukan pendekatan yang terstruktur. Menurut Glaser (2012), strategi pertahanan harus melibatkan keseimbangan antara penguatan militer dan diplomasi.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan menangani dampak yang timbul dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China, khususnya di wilayah Laut China Selatan, dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional Indonesia. Kajian ini akan secara mendalam menyelidiki bagaimana persaingan kedua negara adidaya tersebut berdampak pada stabilitas dan keamanan Indonesia, dengan fokus pada identifikasi serta penilaian ancaman khusus yang mungkin muncul sebagai hasil dari konflik tersebut. Ancaman-ancaman ini akan dievaluasi dalam konteks kepentingan strategis Indonesia di kawasan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi keamanan nasional yang efektif dan pragmatis. Strategi ini akan dirancang untuk membantu Indonesia dalam menghadapi dan mengelola ancaman yang diidentifikasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan militer. Sebagai bagian integral dari penelitian ini, metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) akan diterapkan. AHP merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang sistematis dan telah terbukti efektif, yang dalam konteks ini akan digunakan untuk mendukung formulasi strategi keamanan nasional Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi keamanan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Penggunaan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam pengambilan keputusan strategis,

khususnya dalam konteks keamanan nasional, menawarkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang sangat berharga. Seperti yang diuraikan oleh Saaty (1980), AHP memberikan metodologi untuk mendekomposisi masalah kompleks menjadi serangkaian faktor yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, memungkinkan pembuat kebijakan untuk menilai berbagai opsi secara lebih efektif. Dalam konteks keamanan regional, aplikasi AHP seperti yang dijelaskan oleh Triantaphyllou (2000) menjadi sangat relevan. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai elemen kebijakan, seperti kekuatan militer, diplomasi, dan kerja sama ekonomi, dalam upaya untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif.

Yoon & Hwang (1995) serta Ho et al. (2010) telah menunjukkan efektivitas AHP dalam mengelola keputusan yang rumit dan multiaspek dalam konteks yang berbeda, seperti evaluasi dan seleksi pemasok. Hal ini menegaskan fleksibilitas dan kegunaan AHP sebagai alat untuk berbagai jenis pengambilan keputusan, termasuk dalam keamanan nasional. Mengingat situasi di Laut China Selatan yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik kepentingan, aplikasi AHP dalam strategi keamanan nasional Indonesia menjadi sangat penting. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik dan keamanan di kawasan ini, AHP dapat membantu Indonesia dalam mengidentifikasi ancaman yang paling mendesak, mengevaluasi opsi-opsi untuk menghadapi ancaman tersebut, dan merumuskan strategi yang seimbang antara kebutuhan militer, diplomasi, dan keterlibatan ekonomi.

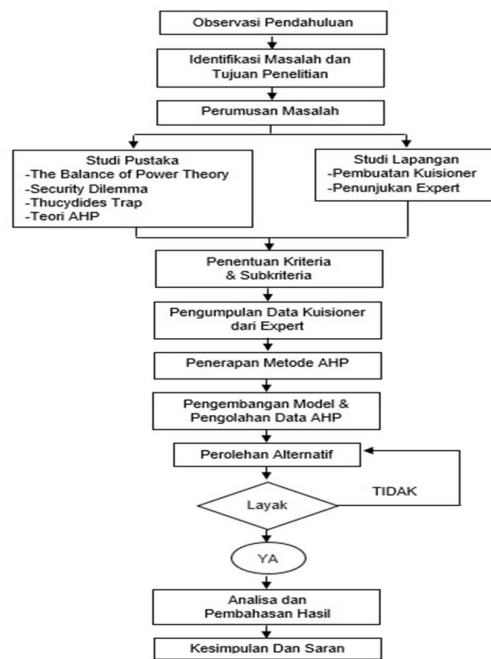
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan AHP secara efektif dalam pembangunan strategi keamanan nasional Indonesia. Ini termasuk mengadaptasi kerangka kerja AHP untuk memenuhi tantangan spesifik yang dihadapi oleh Indonesia, serta mengembangkan kapasitas bagi pembuat kebijakan dan analis untuk menerapkan metode ini dengan cara yang paling efektif. Dengan demikian, AHP dapat menjadi alat yang kuat untuk membantu Indonesia dalam menavigasi lingkungan geopolitik yang kompleks dan seringkali bergejolak di Laut China Selatan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) sebagai alat analisis untuk mengukur dan menganalisis strategi-strategi yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam menghadapi konfrontasi strategis antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Pertama, penelitian ini mendefinisikan masalah keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia dan menentukan solusi yang diinginkan. Ini melibatkan penentuan masalah secara jelas, detail, dan mudah dipahami, dengan memperhatikan bahwa solusi yang dihasilkan bisa lebih dari satu. Kedua, penelitian ini menciptakan struktur hirarki yang dimulai dengan tujuan utama, diikuti oleh pembentukan kriteria dan sub-kriteria yang relevan. Tiga kriteria utama yang dianalisis adalah Eskalasi Konflik Militer, Eskalasi Konflik Ekonomi, dan Eskalasi Polarisasi Politik Global. Setiap kriteria ini kemudian diperinci lagi dalam sub kriteria.

Ketiga, penelitian ini melibatkan pembuatan matriks perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria dan sub-kriteria. Ini termasuk melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria, sub-

kriteria, dan alternatif strategi, menggunakan skala *Saaty* untuk menilai tingkat kepentingan relatif antara elemen-elemen. Keempat, penelitian ini melibatkan pengisian matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan skala intensitas kepentingan yang berkisar dari 1 (kedua elemen sama penting) hingga 9 (salah satu elemen sangat penting). Kelima, penelitian ini menghitung nilai eigen dan menguji konsistensi dari matriks perbandingan, untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan sub-kriteria serta memeriksa konsistensi penilaian. Keenam, langkah-langkah ini diulang untuk semua tingkatan hirarki, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai aspek masalah. Ketujuh, penelitian ini menghitung *vektor eigen* dari matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas relatif dari setiap elemen di semua tingkatan hirarki. Kedelapan, dilakukan pengecekan konsistensi hirarki secara keseluruhan, dengan fokus pada rasio konsistensi yang idealnya harus kurang dari atau sama dengan 10%. Kesembilan, penelitian ini mengagregasikan hasil perbandingan berpasangan untuk mendapatkan bobot keseluruhan dari setiap alternatif strategi dan menganalisis hasil untuk menentukan alternatif strategi dengan bobot tertinggi. Kesepuluh, penelitian ini memvalidasi hasil melalui wawancara dengan pakar dan diskusi kelompok fokus, untuk memastikan bahwa hasilnya relevan dan aplikatif. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian berusaha memberikan analisis yang sistematis dan terstruktur terhadap tantangan keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategi yang berbasis bukti dan analisis mendalam.



Gambar 2 Diagram Alir Metode Penelitian
Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Keterangan Model Hirarki AHP:

Fokus

Strategi Kamnas RI Terhadap Rivalitas As - China Di Laut China Selatan

Kriteria

Kriteria 1 : Eskalasi Konflik Militer

Kriteria 2 : Eskalasi Konflik Ekonomi

Kriteria 3 : Eskalasi Polarisasi Politik Global

Subkriteria

S.K 1.1 : Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS

S.K 1.2 : Insiden Militer di LCS

S.K 1.3 : Lemahnya Kapasitas Militer Negara-negara ASEAN

S.K 2.1 : *Trade War*

S.K 2.2 : Gangguan *Global Supply Chain*

S.K 2.3 : Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

S.K 3.1 : Netralitas ASEAN Terganggu

S.K 3.2 : Rivalitas Politik Aliansi PRO US VS PRO China Menguat

S.K 3.3 : Pengaruh / Intervensi Terhadap Perpolitikan Domestik

Alternatif

Alternatif 1 : Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)

Alternatif 2 : Penguatan Diplomasi dan Sentralitas ASEAN

Alternatif 3 : Penguatan Kemandirian Ekonomi

Hasil Pengolahan Data

Pada perhitungan perbandingan berpasangan Kriteria 1, kriteria 2 dan Kriteria 3 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Penghitungan Kriteria

Kriteria	Hasil
Eskalasi Konflik Militer	0,63335
Eskalasi Konflik Ekonomi	0,2605
Eskalasi Polarisasi Politik Global	0,10616

Dari perhitungan Kriteria diatas maka selanjutnya dicari nilai CR (*Coefisien Ratio*) nya. Dibawah ini adalah Hasil perhitungan CR nya:

Tabel 2. Hasil Perhitungan CR

$CI = (\lambda_{max} - n) / n - 1$	
lamda max (λ_{max}) =	3,055361493
CI=	0,027680747
CR = CI/IR	0,047725425

Nilai CR nya didapat 0,0477, nilai ini menyatakan bahwa konsistensi rasio dari hasil penilaian perbandingan tersebut adalah 4,7 %. Syarat CR adalah lebih kecil dari pada 10 % (Saaty).

Perhitungan Kriteria Terhadap Sub Kriteria

Tahap selanjutnya adalah perhitungan mencari nilai rata-rata daripada skala perbandingan antara Kriteria dengan Sub Kriteria.

Perhitungan Eskalasi Konflik Militer

Tabel 3. Perhitungan Eskalasi Konflik Militer

Eskalasi Konflik Militer	Hasil Rata-Rata
Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS	0,260498
Insiden Militer di LCS	0,106156
Lemahnya Kapasitas Militer Negara2 ASEAN	0,633346

Dari hasil perhitungan diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan CR.

Tabel 4. Perhitungan CR

$CI = (\lambda_{max} - n) / n - 1$	
lamda max =	3,055361493
CI =	0,027680747
CR = CI/IR	0,047725425

CR yang diperoleh adalah 0,0477 atau 4,7 %, hasil tersebut memenuhi syarat.

Perhitungan Eskalasi Konflik Ekonomi

Tabel 5. Perhitungan Eskalasi Konflik Ekonomi

Eskalasi Konflik Ekonomi	Hasil Rata-Rata
Trade War	0,633346
Gangguan Global SUPPLY CHAIN	0,260498
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global	0,106156

Dari hasil perhitungan diatas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan CR:

Tabel 6. Perhitungan CR:

$CI = (\lambda_{max} - n) / n - 1$	
lamda max =	3,055361493
CI =	0,027680747
CR = CI/IR	0,047725425

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0477 atau 4,7 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan Saaty.

Perhitungan Eskalasi Polarisasi Politik Global

Tabel 7. Perhitungan Eskalasi Polarisasi Politik Global

Eskalasi Polarisasi Politik Global	Hasil Rata-Rata
Netralitas ASEAN Terganggu	0,229871
Rivalitas Politik Aliansi Pro US & Pro China Menguat	0,647947
Pengaruh/Intervensi Terhadap Perpolitikan Domestik	0,122182

Dari hasil perhitungan diatas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan CR:

Tabel 8. Perhitungan CR

$CI = (\lambda_{max} - n) / n - 1$	
lamda max =	3,005394525
CI =	0,002697262
CR = CI/IR	0,004650453

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0046 atau 0,46 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty)

Perhitungan Sub Kriteria Terhadap Alternative

Tahap berikut adalah perhitungan mencari hasil nilai rata-rata dari skala perbandingan dan koefisien rasio nya.

Perhitungan Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS

Tabel 9. Perhitungan Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS

Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,2605	0,0477
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,10616	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,63335	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0477 atau 4,7 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty)

Perhitungan Insiden Militer di LCS

Tabel 10. Perhitungan Insiden Militer di LCS

Insiden Militer di LCS	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,12218	0,00465
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,22987	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,64795	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,00465 atau 0,46 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty)

Perhitungan Lemahnya Kapasitas Militer Negara-negara ASEAN

Tabel 11. Perhitungan Lemahnya Kapasitas Militer Negara-negara ASEAN

Lemahnya Kapasitas Militer Negara Asean	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,12218	0,01928
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,22987	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,64795	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,01928 atau 1,9 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Trade War

Tabel 12. Perhitungan Trade War

Trade WAR	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,12218	0,01928
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,22987	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,64795	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,01928 atau 1,9 %. Hasil tersebut memenuhi syarat

ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Gangguan Global SUPPLY CHAIN

Tabel 13. Perhitungan Gangguan Global SUPPLY CHAIN

Gangguan Global Supply Chain	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,10616	0,0477
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,2605	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,63335	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0477 atau 4,7 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

Tabel 14. Perhitungan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,08331	0,09608
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,19319	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,72351	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,09608 atau 9,6 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Netralitas ASEAN Terganggu

Tabel 15. Perhitungan Netralitas ASEAN Terganggu

Netralitas ASEAN Terganggu	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,0882	0,00929
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,2431	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,6687	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,00929 atau 0,9 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Rivalitas Politik Aliansi Pro US & Pro China Menguat

Tabel 16. Perhitungan Rivalitas Politik Aliansi Pro US & Pro China Menguat

Rivalitas Politik Aliansi Pro US & Pro China Menguat	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,15926	0,0606
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,25185	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,58889	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0606 atau 6 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Pengaruh/Intervensi Terhadap Perpolitikan Domestik

Tabel 17. Perhitungan Pengaruh/Intervensi Terhadap Perpolitikan Domestik

Pengaruh/Intervensi Thd Perpolitikan Domestik	Hasil Rata-Rata	CR
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,28284	0,0833
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,64339	
Penguatan Kemandirian Ekonomi	0,07377	

Dari perhitungan CR, diperoleh hasil 0,0833 atau 8,3 %. Hasil tersebut memenuhi syarat ketentuan AHP (Saaty).

Perhitungan Mencari Alternative Terbaik

Tahap terakhir dalam perhitungan ini adalah mencari alternatif terbaik dari hasil perhitungan.

Dari perhitungan tersebut dilakukan perangkingan. Rangking tertinggi (satu) merupakan ALTERNATIVE TERPILIH.

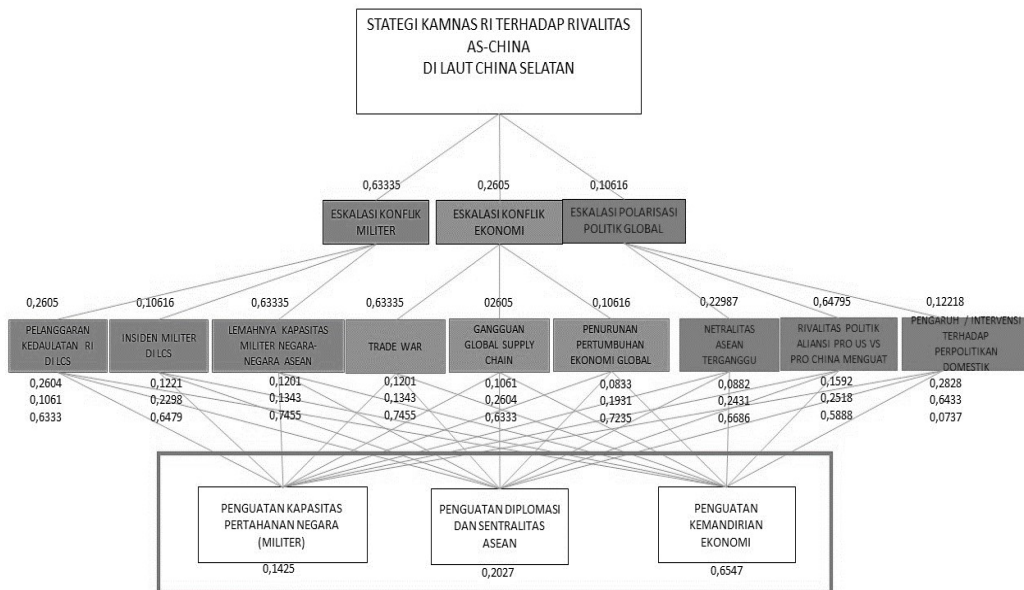
Tabel 18. Perhitungan Mencari Alternative Terbaik

Alternative			Rangking
Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)	0,427502501	0,142500834	3
Penguatan Diplomasi & Sentralitas Asean	0,608220462	0,202740154	2
Penguatan Kemandirian Ekonomi	1,964277037	0,654759012	1

Dari hasil perhitungan dan perangkingan, maka Alternative terpilih adalah Penguatan Kemandirian Ekonomi dengan hasil nilai perhitungan serta rangking tertinggi adalah **0,654759012**.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan deskripsi dan analisis terhadap tren terkini konflik AS-China, maka dapat diperoleh gambaran analisis AHP sebagai berikut:



Gambar 3. Kriteria Utama Strategi Kamnas RI Terhadap Rivalitas AS-China di Laut China Selatan
Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Diagram *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ini memberikan suatu struktur untuk memahami bagaimana Indonesia memprioritaskan strategi keamanan nasionalnya dalam konteks rivalitas AS-China di Laut China Selatan. Di puncak hierarki terdapat tujuan utama, yaitu mengembangkan “Strategi KAMNAS RI Terhadap Rivalitas AS-China di Laut China Selatan”. Tujuan ini merupakan fokus utama dari analisis, menandakan keinginan Indonesia untuk merumuskan respons strategis terhadap tekanan geopolitik yang meningkat.

Tiga kriteria utama yang diidentifikasi dalam analisis ini adalah “Eskalasi Konflik Militer”, “Eskalasi Konflik Ekonomi”, dan “Eskalasi Polarisasi Politik Global” dengan bobot relatif sebesar 0,63335, 0,2605, dan 0,10616 berturut-turut. Bobot ini menunjukkan penekanan yang diberikan pada masing-masing aspek dalam konteks keseluruhan strategi, dengan eskalasi konflik militer dinilai

sebagai area yang paling berpengaruh atau paling berisiko.

Dalam kriteria “Eskalasi Konflik Militer”, terdapat sub-kriteria seperti Pelanggaran Kedaulatan RI di LCS, Insiden Militer di LCS, dan Lemahnya Kapasitas Militer Negara Negara ASEAN yang masing-masing memiliki bobot 0,2605, 0,10616, dan 0,63335. Ini menunjukkan bahwa ada penilaian kuat bahwa lemahnya kapasitas militer ASEAN adalah faktor signifikan dalam eskalasi konflik militer. Untuk “Eskalasi Konflik Ekonomi”, sub-kriteria termasuk *Trade War*, *Gangguan Global Supply Chain*, dan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global. Ketiganya memiliki nilai masing masing 0,63335, 0,2605, dan 0,10616. Kondisi ini meenegaskan pandangan bahwa *Trade War* merupakan faktor paling mempengaruhi ekonomi dalam skenario konflik.

Sub-kriteria di bawah “Eskalasi Polarisasi Politik Global” termasuk Netralitas ASEAN Terganggu dengan bobot nilai 0,22987, Rivalitas Poiltik Aliansi Pro US vs Pro China Menguat dengan bobot yang lebih signifikan yaitu 0,64795, dan Pengaruh/Intervensi Terhadap Perpolitikan Domestik dengan bobot 0,12218. Hasil ini menunjukkan bahwa Rivalitas Poiltik Aliansi Pro US vs Pro China Menguat dianggap memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas regional.

Pada bagian bawah diagram, terdapat tiga opsi strategis yang diusulkan: “Penguatan Kapasitas Pertahanan Negara (Militer)” dengan bobot 0,1425, “Penguatan Diplomasi dan Sentralitas ASEAN” dengan bobot 0,2027, dan “Penguatan Kemandirian Ekonomi” dengan bobot tertinggi yaitu 0,6547. Ini menunjukkan bahwa, menurut analisis ini, strategi terpenting untuk Indonesia adalah memperkuat kemandirian ekonominya, diikuti oleh penguatan diplomasi dan posisi ASEAN, dan terakhir disusul dengan peningkatan kapasitas pertahanan militer.

Angka-angka ini mewakili penilaian relatif dari setiap faktor dan opsi strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang kompleks. Mereka membantu dalam mengarahkan pembuatan kebijakan dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai prioritas dan membuat keputusan informasi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan strategis.

Diskusi

Rivalitas antara AS dan China di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut China Selatan berdampak terhadap keamanan nasional negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Wilayah perairan nusantara dengan tiga Alur Laut Kepulauan (ALKI) menjadi titik sumbat (*choke point*) jika terjadi miskalkulasi yang mengarah pada konflik terbuka di antara dua kekuatan besar tersebut di Laut China Selatan. Akan tetapi dalam konteks lebih luas, rivalitas tersebut tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, melainkan termasuk di bidang politik dan ekonomi.

Dari pembahasan dengan menggunakan metode AHP untuk merumuskan strategi keamanan nasional dalam menghadapi rivalitas antara AS dan China, berdasarkan alternatif yang diperbandingkan diperoleh bahwa alternatif penguatan kemandirian ekonomi memperoleh peringkat tertinggi, disusul dengan penguatan diplomasi dan sentralitas ASEAN, dan penguatan kapasitas pertahanan/militer. Jika diperbandingkan dengan kajian terhadap beberapa literatur (riset dan jurnal) terdapat beberapa ketidak sesuaian pandangan tentang strategi yang sebaiknya dirumuskan oleh

Indonesia.

Dari beberapa studi/riset diperoleh bahwa kesimpulan dan rekomendasi bagi Indonesia adalah dalam penguatan peran dalam bidang politik luar negeri terkait aktivitas diplomasi baik bilateral maupun multilateral terkait posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN secara natural dan perannya sebagai ‘juru damai’ dan ‘perantara’ dalam berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dari berbagai literatur tersebut, disebutkan bahwa penguatan diplomasi dan kaitannya dengan sentralitas ASEAN lebih sering dianggap sebagai peluang strategi Indonesia merespon rivalitas antara AS dan China.

Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN *Outlook in Indo-Pacific* dapat diterima oleh kedua kekuatan utama (AS dan China) berdasarkan kapasitas Indonesia sebagai ‘pemimpin ASEAN’ dan ‘sebagai jembatan’ terjadinya dialog antara dua kekuatan besar dalam forum-forum ASEAN plus (Agastia, 2020). Diplomasi pertahanan menjadi salah satu opsi di samping penguatan kekuatan pertahanan sebagai upaya *self-help* sebagai strategi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif yang tidak memihak (Waluyo, 2023).

Aplikasi diplomasi pertahanan yang cukup efektif dalam mengakomodir keterlibatan dua kekuatan besar (AS dan China) seperti *Multilateral Naval Exercise 2014, 2016 dan 2018* merupakan suatu cara menggunakan kekuatan militer sebagai suatu instrumen nasional yang bersifat *non-coercive* untuk membangun *confidence building measure* di kawasan (Wenas Inkiriwang, 2021). Untuk ‘berebut’ pengaruh di kawasan, AS dan China memiliki dan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Walaupun perebutan pengaruh tersebut meliputi bidang pertahanan, politik dan ekonomi, akan tetapi untuk menjadi kuat seperti saat ini bidang ekonomi menjadi dasar pembangunan di bidang lainnya, termasuk pertahanan bagi China. Dalam strateginya untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di wilayah Indo-Pasifik, China tidak hanya mengandalkan kekuatan pertahanan atau militer. Kemajuan kapasitas pertahanan/militer China sangat tergantung kepada kekuatan ekonominya, sehingga dalam strateginya China menggunakan ekonomi, politik dan pertahanan untuk menguatkan posisinya di kawasan.

Di bidang ekonomi, dari sisi AS, kekuatan ekonomi China menjadi rival terbesar, tidak hanya dalam konteks regional, tetapi juga pada skala global. AS sulit menandingi pengaruh ekonomi China di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Asia Tenggara. Bahkan China juga menjadi salah satu mitra terpenting dalam bidang ekonomi. Begitu juga bagi mitra strategis atau sekutu AS di kawasan. Bagi Australia, Jepang dan India, saling ketergantungan ekonomi dengan China menjadi suatu realitas bagi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ekonomi negara-negara di Asia Tenggara berada pada posisi di tengah-tengah di antara dua kepentingan ekonomi dua kekuatan, AS dan China di mana interdependensi telah menjadi penyeimbang dan faktor tetap terkendalinya perdamaian dan stabilitas kawasan (Ciorciari, 2009).

Sementara dari Kebijakan pemerintah, Indonesia memprioritaskan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercantum dalam Visi Indonesia 2045, di mana

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama (Bappenas, 2019). Walaupun penguatan kemandirian ekonomi dan penguatan peran Indonesia dalam diplomasi lebih tinggi daripada penguatan kapasitas pertahanan/militer, hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah RI seperti yang tergambar dalam pembangunan *Minimum Essential Force* dalam menghadapi ancaman eksternal terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Menkopolhukam sampaikan pemerintah akan terus melakukan kebijakan penguatan pertahanan, termasuk antisipasi ancaman di laut Natuna.

Jika dicermati, dengan anggaran pertahanan yang masih di bawah 1% PDB, harus diakui bahwa secara internal, strategi keamanan nasional untuk menghadapi dampak rivalitas AS-China di Laut China Selatan masih difokuskan secara berurutan dari penguatan ekonomi, diplomasi baru kemudian penguatan pertahanan. Sebagai implikasi dari strategi tersebut di atas, konsekuensinya adalah dengan relatif terbatasnya kemampuan Indonesia dalam hal pertahanan jika terjadi konflik terbuka antara AS beserta sekutunya dengan China di Laut China Selatan maka potensi pelanggaran wilayah maupun ancaman *hostile action* baik dari pihak AS maupun China akan sangat tinggi.

Dalam konteks rivalitas yang meningkat antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan, Indonesia menghadapi serangkaian ancaman yang beragam dan kompleks, mempengaruhi keamanan nasional dari berbagai sudut. Ancaman eksternal yang paling signifikan adalah potensi konflik terbuka antara dua kekuatan besar ini di Laut China Selatan. Konflik ini bukan hanya membawa risiko pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia, tetapi juga dapat mengancam keamanan maritim dan stabilitas regional. Dengan Indonesia memiliki wilayah perairan strategis yang menjadi jalur utama navigasi internasional, setiap ketegangan di Laut China Selatan langsung berimbas pada kepentingan nasionalnya.

Secara internal, situasi ini dapat menimbulkan polarisasi politik dalam negeri, memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Ketegangan geopolitik di kawasan dapat meningkatkan sentimen nasionalisme, memperdalam perpecahan politik, dan menciptakan tekanan pada pemerintah untuk menavigasi dengan cermat antara kepentingan kedua kekuatan besar tersebut. Risiko publik juga menjadi perhatian utama. Konflik regional berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, baik secara langsung melalui insiden militer, maupun secara tidak langsung melalui dampak ekonomi, seperti gangguan pada jalur perdagangan dan suplai energi. Pada tingkat individu, ketidakstabilan geopolitik meningkatkan ancaman keamanan pribadi bagi warga negara. Situasi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dari gangguan pada perjalanan hingga risiko bagi warga negara yang bekerja atau berada di kawasan konflik.

Ancaman *cyber* juga menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan. Dalam era digital saat ini, konflik geopolitik seringkali meluas ke ruang siber, di mana infrastruktur nasional vital, termasuk jaringan komunikasi dan sistem keuangan, dapat menjadi target serangan siber. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk memperkuat kapasitas *cyber defense* guna melindungi infrastruktur kritis nasional. Dengan memahami keragaman ancaman ini, Indonesia dituntut untuk mengembangkan strategi

keamanan nasional yang komprehensif, mencakup penguatan ekonomi, diplomasi, serta pertahanan, untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan bangsa. Strategi ini harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang cepat berubah dalam lingkungan geopolitik regional, memastikan bahwa Indonesia mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini.

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika yang ditimbulkan oleh rivalitas AS-China di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut China Selatan, tujuan keamanan nasional Indonesia menjadi lebih vital dan multifaset. Tujuan-tujuan tersebut adalah menjaga kedaulatan NKRI, menjaga stabilitas nasional, dan menjaga keselamatan bangsa. Ini mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan militer, yang semuanya saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut secara holistik.

Dalam konteks politik, menjaga kedaulatan NKRI melibatkan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional dan regional, terutama di forum ASEAN, serta mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis, adalah penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut, sambil menegaskan hak dan kedaulatan atas wilayahnya.

Dari segi ekonomi, tujuan Kamnas mencakup penguatan kemandirian ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal. Ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi geopolitik yang dapat mengganggu perdagangan dan investasi. Dengan demikian, memperkuat kerja sama ekonomi regional dan memperluas keragaman mitra dagang menjadi kunci. Secara sosial, menjaga stabilitas nasional juga berarti memastikan kohesi sosial di dalam negeri. Hal ini penting untuk mencegah polarisasi yang dapat diperburuk oleh ketegangan geopolitik. Penguatan identitas nasional, peningkatan kualitas pendidikan dan informasi, serta penanganan isu-isu sosial yang sensitif, semua berperan penting dalam menjaga keutuhan sosial Indonesia.

Dalam aspek militer, menjaga keselamatan bangsa mencakup penguatan kapasitas pertahanan untuk menangkal dan mengelola ancaman militer, baik dari ancaman konvensional maupun asimetris, termasuk ancaman siber. Ini mencakup modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan pelatihan dan kemampuan personel, serta pengembangan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain yang sejalan dengan kepentingan Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan militer, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa negara ini tidak hanya dapat bertahan dalam menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi perubahan lingkungan geopolitik global. Langkah-langkah ini diharapkan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, stabil, dan aman, dalam konstelasi geopolitik yang terus berubah di kawasan Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Melalui penerapan metode AHP, diperoleh hasil dimana prioritas strategi nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman rivalitas AS dan China di Laut China Selatan yang terbaik adalah melalui strategi penguatan kemandirian ekonomi. Selanjutnya adalah strategi penguatan diplomasi dan sentralitas ASEAN, dan terakhir adalah strategi penguatan kapasitas pertahanan negara. Hasil analisis AHP ini sesungguhnya telah tergambar dalam kebijakan penganggaran keuangan Nasional saat ini dimana pembangunan kemandirian ekonomi menjadi prioritas utama melalui kebijakan hilirisasi berbagai komoditas Nasional, penguatan UMKM melalui bantuan kredit terjangkau (KUR)/permodalan, digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur secara massive, perbaikan iklim investasi dan program ekonomi hijau.

Walaupun demikian, penguatan diplomasi Indonesia untuk menjaga kawasan Indo Pasifik tetap aman dan terhindar dari konflik terbuka juga terus dilakukan melalui peran aktif dan inisiatif Indonesia di berbagai forum regional dan multilateral, termasuk melalui Ketetapan ASEAN G20 dan terlibat aktif dalam forum-forum internasional lainnya. Selanjutnya, penguatan pertahanan negara juga terus dilakukan walaupun bersifat bertahap. Dalam RAPBN 2024, Kementerian Pertahanan merupakan Kementerian yang diberikan alokasi anggaran APBN terbesar kedua di bawah Kementerian PUPR (Rp 146.8 triliun), dimana Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 135.4 triliun. Walaupun terlihat cukup besar, namun anggaran pertahanan tersebut ternyata masih jauh dari cukup untuk membiayai program modernisasi alutsista nasional secara komprehensif. Anggaran pertahanan RI tersebut hanya sebesar 0.7% dari GDP, lebih rendah dibanding sejumlah negara lain di kawasan, misalnya Singapura (2.8%), Vietnam (2.3%), Thailand (1.2%), Filipina (1%) dan Malaysia (1%).

Dengan melihat pada hasil analisis AHP dan tinjauan literatur terkait strategi keamanan Indonesia dalam menghadapi ancaman peningkatan rivalitas AS dan China di kawasan laut China Selatan, maka dapat direkomendasikan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Selain menghadirkan ancaman, rivalitas dua kekuatan besar tersebut juga menghadirkan peluang di berbagai bidang. Indonesia harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari persaingan tersebut.
2. Indonesia perlu terus mendorong sentralitas ASEAN di kawasan Indo Pasifik sebagai penyeimbang atas rivalitas AS dan China serta mencegah konflik terbuka di kawasan.
3. Indonesia perlu terus memonitor dengan baik dan mampu dengan cepat mengantisipasi dinamika yang berkembang dalam rivalitas AS dan China tersebut.
4. Dengan tetap memprioritaskan kebijakan penguatan kemandirian ekonomi, Indonesia akan mengembangkan ketahanan ekonomi Nasional terhadap risiko guncangan ekonomi global apabila konflik terbuka kedua negara tersebut muncul dan bereskalasi.

5. Secara periodik, Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kapabilitas dan kapasitas pertahanan Nasional ketika menghadapi risiko konflik terbuka AS dan China di laut China Selatan.

Guna semakin memperkuat data dan mendukung formulasi kebijakan pertahanan Nasional yang lebih baik di masa depan, kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait prioritas kebijakan Indonesia dalam menghadapi dinamika persaingan AS dan China di laut China Selatan secara lebih spesifik di tiap alternatif, misalnya terkait angka ideal persentase anggaran pertahanan terhadap GDP, efektivitas strategi ASEAN dalam meredam eskalasi ketegangan di laut China Selatan serta bagaimana Indonesia telah dan dapat memanfaatkan persaingan AS dan China guna lebih mendorong kemajuan dan kemandirian ekonomi Nasional di masa depan.

REFERENSI

- Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293–305. <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Bappenas. (2019). Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. *Sistem Manajemen Pengetahuan*, 32, 1–25. [https://www.bappenas.go.id/files%0A/Visi Indonesia 2045/Dokumen%0AAlengkap 2045_final](https://www.bappenas.go.id/files%0A/Visi%20Indonesia%202045/Dokumen%0AAlengkap2045_final).
- Beckman, R. (2014). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.
- Ciorciari, J. D. (2009). *The balance of great-power influence in contemporary Southeast Asia*. 9(1), 157–196.
- Glaser, B. S. (2012). *Armed Clash in the South China Sea*. Council on Foreign Relations.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 202(1), 16-24.
- Kaplan, R.D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Storey, I. (2016). *Demystifying China's Role in the South China Sea*. ISEAS–Yusof Ishak Institute. Relevansi dengan keamanan nasional Indonesia
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill International Book Company.
- Triantaphyllou, E. (2000). *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Springer, Applied Optimization.
- Waluyo, S. D. (2023). *Indonesian Defense Diplomacy in Responding to China 's National Interests in the South China Sea*. 12(1).

- Wenas Inkiriwang, F. (2021). Multilateral Naval Exercise Komodo: Enhancing Indonesia's Multilateral Defence Diplomacy? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 418–435. <https://doi.org/10.1177/18681034211008905>
- Yoon, K., & Hwang, C. L. (1995). *Multiple Attribute Decision Making: An Introduction*. Sage Publications.